

## Faktur Pajak

Nama: KONSUMEN METROPOLITAN PT  
TELKOM  
Alamat: JL KEBON SIRIH NO.10-12, KOTA ADM.  
JAKARTA PUSAT #0023686629073000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 03002500044417395

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : KONSUMEN METROPOLITAN PT TELKOM  
Alamat : JL KEBON SIRIH NO.10-12, RT 000, RW 000, GAMBIR, GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI  
JAKARTA 10110  
NPWP : 0023686629073000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK  
Alamat : JL JAPATI NO.1, RT 000, RW 000, SADANG SERANG, COBLONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
40133 #0010000131093000000000  
NPWP : 0010000131093000  
NIK : -  
Nomor Paspor : -  
Identitas Lain : -  
Email: 405142@telkom.co.id

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Printer Epson L3110 (Print Scan Copy USB) Rp 2.550.000,00 x 1,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.550.000,00
2	000000	Tinta Cartridge Printer Epson 001 Set Rp 435.000,00 x 10,00 Set Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	4.350.000,00
3	000000	Hardisk Eksternal 2Tb Rp 2.075.000,00 x 5,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	10.375.000,00
4	000000	Reed Diffuser Rp 321.000,00 x 10,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	3.210.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			20.485.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			18.777.917,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			2.253.350,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani

secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 20 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik  
RADIAN SIGIT DWIANANTO

(Referensi: )

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2